

Perubahan Sosial dan Politik pada Peralihan Abad XX

Politik Etis, pendidikan kolonial, dan nasionalisme Indonesia

Keuangan Hindia Belanda terkuras akibat Perang Diponegoro. Karena itu Gubernur *van den Bosch* menciptakan Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan kepada rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, Sistem Tanam Paksa dikritik oleh golongan liberal sehingga praktek ini kemudian dihapus. Golongan liberal yang kemudian digantikan oleh golongan etis ternyata juga menyengsarakan rakyat.

Pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah untuk memenuhi kebutuhan tenaga administratif rendah. Sekolah tinggi akhirnya juga didirikan dan lulusannya merupakan *elit baru* pendukung nasionalisme Indonesia.

Pergerakan nasional

Perang Dunia I dan hak menentukan nasib sendiri

Perjuangan cara lama tidak menguntungkan. Pada awal abad XX dimulai cara perjuangan modern, yaitu dengan organisasi modern yang mempunyai pimpinan, ideologi, dan massa. Pergerakan nasional yang kemudian lahir mendapat pengaruh dari dalam dan luar negeri.

Perang menghancurkan budaya manusia. Setelah Perang Dunia I orang menginginkan perdamaian. "Empat Belas Pasal dari Wilson" membuka jalan baru bagi bangsa-bangsa terjajah untuk menentukan nasib sendiri. Kesempatan ini digunakan oleh para elit Indonesia untuk meneruskan cita-citanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Emansipasi wanita

Di kalangan wanita tumbuh kesadaran untuk meningkatkan derajat kaumnya dengan meninggalkan adat dan memajukan pendidikan. Di Jawa Tengah gerakan emansipasi dipelopori oleh R.A. Kartini, di Priangan oleh Raden Dewi Sartika, dan di Sulawesi Utara oleh J.C. Walanda Maramis.

Awal organisasi modern

Budi Utomo.

Dengan tujuan menghimpun dana belajar bagi anak-anak Indonesia, dr. Wahidin Sudirohusodo berpropaganda keliling Jawa pada tahun 1906-7. Maksud ini dikembangkan oleh Sutomo dan Cipto Mangunkusumo dengan didirikannya BU pada

tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta.

BU yang sifatnya lokal ini mengembangkan kebudayaan Jawa, dan beranggotakan para priyayi. Meskipun demikian, perjuangannya mengarah ke tingkat nasional. Pada tahun 1914 BU membentuk Komite Pertahanan Hida. Tahun 1935 BU bergabung dengan Parindra.

Sarekat Islam.

Pada tahun 1909 R.M. Tirtoadisuryo mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Jakarta, dan tahun 1911, di Bogor. Kerjasama H. Samanhudi dan R.M. Tirtoadisuryo yang bertujuan menghilangkan monopoli pedagang Cina mendorong didirikannya SI di Surakarta pada tahun 1912.

Agama Islam digunakan sebagai pengikat anggotanya. Pada tahun 1913 Umar Said Cokroaminoto mengemukakan bahwa perekonomian di Indonesia perlu dikembangkan agar bangsa Indonesia tidak tergantung pada ekonomi bangsa asing. Keanggotaan SI meluas si masyarakat kalangan bawah. Pada tahun 1917 anggotanya berjumlah 450,000 dan tersebar di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah yang berkuasa takut terhadap SI sehingga pemerintah hanya memberi badan hukum pada SI pusat.

Pada tahun 1917 timbul "SI Merah" di cabang Semarang yang mendapat pengaruh komunis. SI yang masih "putih" dipimpin oleh Agus Salim, Cokroaminoto dan Abdul Muis. Karena perkembangan ke arah kebangsaan yang makin kuat, pada tahun 1923 SI diganti menjadi PSI, dan pada tahun 1927 menjadi PSII.

Indische partij.

IP didirikan pada tahun 1912 di Bandung oleh Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Cipto Mangunkusumo. Organisasi campuran ini menginginkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913 IP dilarang dan tokoh-tokohnya dibuang, namun mereka diizinkan tinggal di Belanda.

IP pendek umurnya tapi besar pengaruhnya karena berjiwa nasionalisme Indonesia. Organisasi itu kemudian bernama *Insulinde* dan pada tahun 1919 bernama *National Indische Partij*.